

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia. Pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan pembangunan ekonomi negara. Manusia adalah perilaku aktif yang dapat mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada prasarana, modal dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu

pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah (Adisasmita, 2005: 191)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2013: 2)

Berdasarkan data BPS dalam angka 2015, diketahui bahwa dari total penduduk miskin di Indonesia hampir 28592,79 juta orang. Khususnya untuk tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada Maret tahun 2015 sebesar 398,92 ribu orang dan September 2015 sebesar 368,57 ribu orang. Untuk daerah Jakarta Selatan total penduduk miskin sebesar 3,47 persen telah terjadi penurunan 0,02 persen dari data sebelumnya yaitu 3,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mengalami penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta khususnya daerah Jakarta Selatan.

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki permasalahan kemiskinan. Seringkali wilayah provinsi lain di Indonesia memandang keberadaan Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai pusat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pada khususnya untuk berbagai masalah pembangunan, ekonomi termasuk dalam hal ini adalah pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka Pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk menanggulangnya adalah dengan program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga, atau rumah tangga. Berbagai program penanggulangan kemiskinan diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Lembaga Keuangan Mikro melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE).

KUBE merupakan salah satu usaha kecil dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki keunggulan dari program penanggulangan kemiskinan lainnya. Ditandai dengan penanggulangan KUBE dan LKM yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial RI sejak tahun 2003 dengan membentuk LKM-KUBE Sejahtera. Pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2005 telah terbentuk LKM-KUBE Sejahtera sebanyak 87 unit yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Kemudian tahun 2008 sampai 2009 telah melaksanakan Penanggulan Kemiskinan Perdesaan melalui 35 unit LKM-KUBE Sejahtera yang tersebar di 19 provinsi. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2010 telah terbentuk 144 LKM-KUBE Sejahtera yang melibatkan 1440 KUBE.

Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu telah memiliki lebih dari seratus LKM-KUBE di wilayah masing-masing. Data Dinas Sosial DKI Jakarta tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah total KUBE adalah sebanyak 789 KUBE dan 29 LKM.

Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan pada berbagai aspek. Aspek SDM salah satunya, kemampuan manajerial pengelolaan baik secara administratif maupun keuangan masih rendah terbatas manual serta masih kurangnya motivasi dari anggota KUBE. Sehingga menyebabkan KUBE tidak tumbuh secara optimal. Beberapa KUBE yang sudah memproduksi masih belum memiliki kemasan yang baik serta pemasaran terhadap produknya masih terbatas di lingkup wilayahnya. Sedangkan dari aspek permodalan, masih terdapat masalah dalam pengembangan bantuan dan belum adanya perbankan yang memberikan pinjaman modal.

Awal mendirikan Kelompok Usaha Bersama yakni dengan memiliki anggota dengan latar belakang keluarga yang tergolong miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap seperti salah satu pekerjaannya adalah buruh. Selain itu, segi penghasilan pokok kepala keluarga yang tidak stabil dan segi pendidikan kepala keluarga yang berpendidikan rendah.

Latar belakang keluarga merupakan salah satu kriteria untuk mengikuti program pendekatan KUBE. Permasalahan latar belakang keluarga dari segi pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, dan usia merupakan hal utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga. Penentu tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat berdasarkan pendapatan keluarga setiap harinya. Berdasarkan latar belakang keluarga dari segi pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, dan usia dapat menjadi dasar untuk dapat mengikuti program KUBE.

Menentukan jenis usaha merupakan salah satu penerapan KUBE untuk menentukan tingkat keberhasilan program KUBE. Jenis usaha yang digerakkan KUBE berbagai macam yakni bergerak di bidang boga, rias,

busana/ konveksi, otomotif bengkel dan seterusnya. Dalam menentukan jenis usaha di KUBE berkaitan dengan lingkungan berdirinya KUBE mulai dari adat istiadat, agama, dan sosial ekonomi. Maka mempengaruhi suatu keberhasilan program KUBE.

Program mengentaskan kemiskinan di perkotaan melalui KUBE merupakan langkah untuk mensejahterakan keluarga. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga adalah dengan melihat pola pengeluaran konsumsi rumahtangga pada suatu wilayah. Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan dibandingkan seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Sehingga, ada permasalahan baru setiap terjadi kenaikan harga – harga baik kebutuhan primer dan sekunder. Karena hal tersebut, pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta menetapkan solusi dengan mengembangkan program usaha kecil berupa KUBE.

Berdasarkan data BPS Daerah Kota Jakarta Selatan dalam angka 2015, rata-rata proporsi pengeluaran makanan rumah tangga di Jakarta Selatan

selama tahun 2014 adalah 30,87 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 69,13 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Apabila dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita terlihat bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka proporsi pengeluaran makanan semakin menurun jika dibandingkan pengeluaran non makanan. Proporsi pengeluaran makanan pada kelompok pengeluaran per kapita 500.000 - 749.999 rupiah adalah 59,22 persen sementara pada kelompok $\geq 2.000.000$ rupiah hanya sebesar 22,87 persen. Jika dilihat persentase rumah tangga menurut kelompok pengeluaran per kapita, 34,10 persen rumah tangga di Jakarta Selatan berada pada kelompok pengeluaran per kapita di atas 2 juta rupiah dan hanya 2,43 persen rumah tangga berada di kelompok pengeluaran per kapita dibawah 500 ribu rupiah.

Oleh karena itu, melalui program pemerintah pendekatan KUBE dapat memberikan dampak bagi keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan studi penelitian mengenai dampak program penanggulangan kemiskinan perkotaan di DKI Jakarta dengan pendekatan KUBE. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap tingkat pendapatan keluarga. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Analisis Dampak Program Kelompok Usaha Bersama Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana latar belakang keluarga sebelum bekerja di KUBE?
- 2) Berapa pendapatan anggota keluarga yang bekerja di KUBE?
- 3) Bagaimana proses program KUBE hingga mencapai keberhasilan?
- 4) Apa dampak program KUBE terhadap tingkat pendapatan keluarga?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah penelitian agar diperoleh hasil penelitian lebih fokus. Adapun, permasalahan dalam penelitian dibatasi pada: Adakah pengaruh program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Apakah Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdampak pada tingkat pendapatan keluarga?”

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pada teori ekonomi keluarga dan ilmu kesejahteraan

keluarga yang berkaitan dengan dampak program KUBE terhadap tingkat pendapatan keluarga.

1.5.2. Kegunaan Sosial Praktisi

1.5.2.1. Untuk Pelaksanaan Keanggotaan Program KUBE

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan selanjutnya untuk bahan evaluasi dalam program KUBE terhadap tingkat pendapatan keluarga bagi tingkat Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan sebagai pelaksana program KUBE.

1.5.2.2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang memperkaya kajian teori dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2.3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan membantu masyarakat khususnya untuk keluarga yang tergolong miskin untuk mengikuti program KUBE agar dapat mengembangkan minat menjalankan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.